

PENDAMPINGAN DALAM PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WISATA KABUPATEN BANGKALAN

Mohtar Rasyid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

mohtar.rasyid@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan dalam penentuan prioritas pembangunan bertujuan untuk membantu aparat daerah dalam menentukan strategi pengembangan wilayah untuk wisata lokal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Pihak Universitas Trunojoyo Madura. Metode pelaksanaan secara umum terbagi dalam tiga tahap. Pertama, identifikasi masalah penentuan prioritas pembangunan. Dalam tahap ini, tim dari Universitas Trunojoyo Madura melakukan studi awal untuk mengidentifikasi problem dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Kedua, penyampaian hasil temuan awal dan kolaborasi dengan pihak Balitbangda Kabupaten Bangkalan sebagai mitra kegiatan. Ketiga, sosialisasi hasil kegiatan dalam bentuk diseminasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa identifikasi prioritas pengembangan wilayah berhasil dilakukan. Selanjutnya, aparat pemerintah dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk menentukan prioritas pengembangan wilayah untuk kasus yang berbeda.

Kata Kunci: Prioritas Pengembangan; Pendampingan Aparat; Pembangunan Daerah

***Abstract:** Community service activities in the form of assistance in determining development priorities aim to assist regional officials in determining regional development strategies for local tourism. This activity was carried out as a follow up to the cooperation agreement between the District Government of Bangkalan and Universitas Trunojoyo Madura. The method of implementation is generally divided into three stages. First, identify the problem of determining development priorities. In this stage, a team from the University of Trunojoyo Madura conducted a preliminary study to identify problems and various alternative solutions to problems. Second, delivery of initial findings and collaboration with the Balitbangda Bangkalan as the activity partner. Third, the dissemination of results of activities in the form of dissemination of the results of community service activities. The results of the activities showed that the identification of priority for regional development was successfully carried out. Furthermore, government officials can use the same approach to determine regional development priorities for different cases.*

Keywords: Development Priorities; Apparatus Assistance; Regional Development



Article History:

Received : 28-02-2020

Revised : 29-03-2020

Accepted : 08-04-2020

Online : 02-06-2020



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka daerah diberikan hak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Dalam konteks ini pemerintah pusat tidak lagi mengatur, mendominasi pemerintahan daerah dan masyarakat daerah, peran pemerintah pusat akan diserahkan kepada pemerintah daerah mulai dari anggaran pendapatan, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, hingga pinjaman daerah. Peranan pemerintah pusat dalam desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah (Setyaningrum, Budi, & Masduqi, 2017). Oleh karena itu baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat hendaknya berupaya keras meningkatkan perekonomian daerah termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain pengolahan terhadap sumber PAD, Pemerintah Daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD sehingga dengan semakin banyaknya PAD yang didapat maka diharapkan semakin berkembang pembangunan daerah (Nurhadi, 2014).

Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru. Pariwisata juga diartikan sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keselarasan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Menurut undang-undang kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Jenis wisata ditentukan menurut motif dan tujuan perjalanan, dapat pula dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut:

1. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk

mengendurkan ketegangan syarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar Kabupaten (Mukti, Makmur, & Adiono, 2015)

2. Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan keletihannya. Biasanya, mereka tinggal selama mungkin di tempat-tempat yang dianggapnya benar-benar menjamin tujuan-tujuan rekreasinya tersebut (misalnya di tepi pantai, di pegunungan, di pusat-pusat peristirahatan atau pusat-pusat kesehatan).

3. Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar dari pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain seperti misalnya mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu atau sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau juga untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain.

4. Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*)

Jenis ini dibagi menjadi dua kategori:

- a. *Big Sports Events*, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti *Olympiad Games*, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain
- b. *Sporting tourism of the practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih mempraktikkan diri, seperti pendakian gunung, olah raga naik kuda, berburu, memancing, dan sebagainya.

5. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialisasi, tetapi juga semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instansi teknis yang bahkan menarik orang-orang di luar profesi ini (Susilawati, H. Mappamiring, 2016).

6. Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan atas dasar konvensi atau konferensi yang terjadi yang biasanya dihadiri oleh ribuan orang.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah yakni pengoptimalan potensi dalam sektor pariwisata (Katarina & Fithriana, 2017). Pariwisata sendiri adalah sebagai industri jasa yang digolongkan

sebagai industri tersier perannya cukup penting dalam kebijakan peningkatan kesempatan kerja (Harahap, 2018). Dengan semakin pesatnya arus perjalanan wisata Indonesia sudah seharusnya dapat memanfaatkan semua potensi yang ada dengan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan menggairahkan pembangunan di dalam negeri. Potensi sektor pariwisata yang besar, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di daerah yang relatif masih tertinggal (Sugiyarto & Amaruli, 2018). Pengembangan wilayah berbasis pariwisata nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah pembangunan (Khotimah, Wilopo, & Hakim, 2017). Apalagi jika prasarana awal telah tersedia (Primadani, Mardiyono, & Riyanto, 2013), maka pengembangan sektor pariwisata akan lebih mudah dioptimalkan (Prasodjo, 2017).

Salah satu daerah di Jawa Timur yang masih tertinggal namun memiliki potensi perkembangan yang sangat pesat adalah di Kabupaten Bangkalan. Pembangunan wilayah di Kabupaten Bangkalan diharapkan meningkat dengan pesat seiring dengan selesainya pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan kaki Surabaya dengan Kabupaten Bangkalan. Namun demikian, hingga saat ini Kabupaten Bangkalan (bersama dengan Kabupaten Sampang) masih tercatat sebagai salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Padahal potensi ekonomi pasca Suramadu seharusnya dapat lebih dioptimalkan karena biaya ekonomi yang selama ini menjadi penghalang kemajuan di Pulau Madura telah dapat dipangkas secara signifikan. Pemerintah daerah setempat seharusnya memiliki terobosan guna memanfaatkan momentum pembangunan sarana agar ketertinggalan dengan wilayah lain dapat segera dikikis.

Salah satu strategi yang dapat dipilih oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat adalah dengan memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya (Primadani et al., 2013). Potensi ini dapat dikembangkan dalam sektor pariwisata. Selama ini, Kabupaten Bangkalan dikenal memiliki potensi wisata yang cukup beragam, antara lain adalah wisata alam, wisata religi, wisata budaya dan yang tak kalah menarik adalah wisata kuliner. Wisata alam yang berada di Kabupaten Bangkalan sebenarnya relatif beragam mulai wisata pantai di daerah Tanjung Bumi, wisata gua putih yang ada di Daerah Jaddih, serta panorama pantai melalui mercu suar yang ada di kawasan Ujung Piring. Sementara itu wisata religi juga tidak kalah menarik untuk dikunjungi seperti Makam K.H. Moh Kholil yang ada di Desa Mlajah serta Makam Rato Ebu yang ada di Kecamatan Arosbaya. Wisata budaya yang mungkin wajib dikunjungi antara lain adalah acara Karapan Sapi yang wahananya tersedia di Desa Bancaran.

Perkembangan terakhir yang cukup menarik adalah munculnya wisata kuliner di Bangkalan. Hampir dipastikan, orang yang berkunjung ke Bangkalan selalu menginginkan untuk mencicipi makanan bebek

Bangkalan yang sangat khas, salah satunya yang cukup fenomenal adalah Bebek Sinjai. Sebenarnya banyak hidangan khas Madura yang berasal dan hanya ada di Bangkalan, seperti Bubur Madura. Namun demikian, kekayaan kuliner tersebut belum diekspose secara optimal. Salah satu kendala yang menghambat perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan adalah relatif minimnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Padahal keberadaan sarana dan prasarana ini relatif vital untuk mengembangkan potensi penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Meskipun prasarana awalnya sudah tersedia, namun masih tetap memerlukan penambahan prasarana agar pengembangan sektor pariwisata lebih dapat berkembang lebih pesat

Atas dasar itulah maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) setempat, bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura mengadakan kegiatan pendampingan kepada aparat perencana pembangunan daerah untuk menentukan prioritas pembangunan menggunakan teknik analisis pengambilan keputusan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan daerah untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan, terutama untuk obyek pariwisata daerah.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan program prioritas pengembangan wilayah pariwisata di Kabupaten Bangkalan ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, identifikasi masalah penentuan prioritas pembangunan. Dalam tahap ini, tim dari Universitas Trunojoyo Madura melakukan studi awal untuk mengidentifikasi problem dan berbagai alternatif pemecahan masalah.

Kedua, penyampaian hasil temuan awal dan kolaborasi dengan pihak Balitbangda Kabupaten Bangkalan sebagai mitra kegiatan. Dalam tahap ini pihak FEB UTM dengan Balitbangda Bangkalan bertemu untuk mendengarkan penyampaian hasil identifikasi awal permasalahan pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kegiatan pendampingan dimulai pada tahap ini karena metode penentuan keputusan disampaikan secara sistemis dengan tujuan agar kedua belah pihak memiliki acuan metode yang sama untuk menentukan target prioritas dalam membangun sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Penyamaan persepsi tidak hanya sekedar menyajikan metode analisis yang akan digunakan, akan tetapi penyamaan tentang data awal yang dijadikan sebagai input dalam kajian. Setelah proses ini berlangsung maka masing-masing pihak baik dari FEB UTM maupun dari Balitbangda bisa mengembangkan model kajian dengan menambah data dan informasi yang relevan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Pihak FEB

UTM memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan data lapangan dengan survei, sementara pihak Balitbangda Bangkalan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan pihak terkait yang meliputi pengambil kebijakan di level daerah.

Adapun langkah ketiga adalah sosialisasi hasil kegiatan dalam bentuk diseminasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan diseminasi hasil kegiatan ini turut diundang adalah semua pihak yang memiliki kaitan dengan pengembangan sektor pembangunan daerah terkait, tidak hanya bidang pariwisata. Intinya, semua bidang yang memerlukan analisis pengambilan keputusan dapat hadir.

Salah satu model analisis penentuan prioritas yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Metode *Analytical Hierarchy Process* atau yang lebih dikenal sebagai AHP (Astuti, Nurjani, & Susanti, 2017). Penggunaan AHP dimaksudkan mencari skala prioritas dari berbagai alternatif kebijakan berdasarkan pandangan dan kepentingan para *stakeholder*. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia (Kamil, Bakhtiar, & Sriyanto, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendampingan

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, kegiatan pendampingan penyusunan strategi penentuan prioritas kawasan wisata dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah pariwisata sebagai kajian awal untuk menentukan indikator kunci dalam analisis.



Gambar 1. Identifikasi Masalah Awal

Tahap selanjutnya adalah audiensi dengan pihak Balitbangda untuk menyampaikan model analisis serta kebutuhan data yang diperlukan. Dalam tahap ini penyamaan persepsi tentang pengembangan pariwisata daerah perlu disampaikan secara komprehensif. Baik pihak FEB Universitas Trunojoyo Madura (UTM) maupun Balitbangda Kabupaten Bangkalan memiliki kontribusi yang seimbang terhadap jalannya kegiatan pendampingan. Pihak FEB UTM dalam hal ini lebih banyak berperan

sebagai penyedia kerangka analitis agar penentuan prioritas pembangunan memenuhi harapan yang telah ditetapkan.



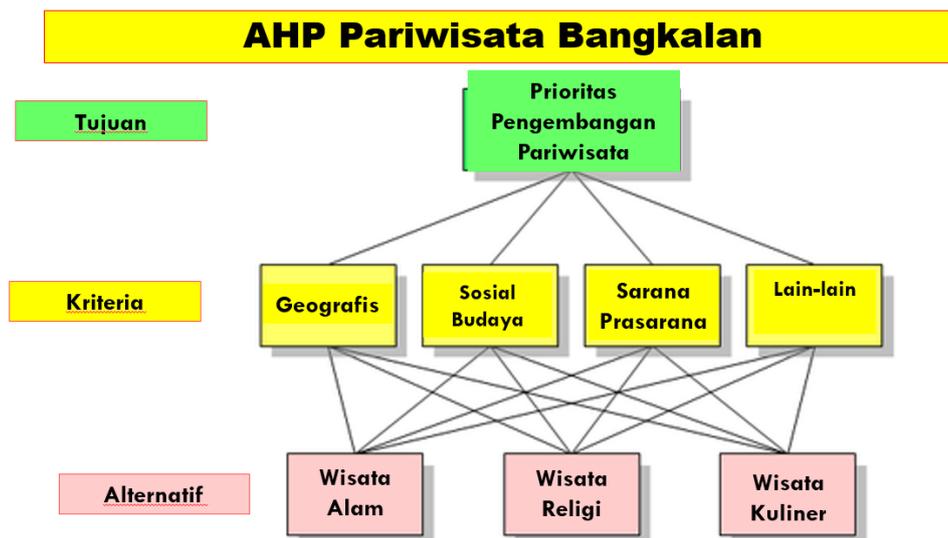
Gambar 2. Pendampingan penyusunan AHP Pariwisata.

Proses pendampingan juga diperkuat dengan tinjauan lapang untuk melihat destinasi wisata yang akan dievaluasi. Kegiatan ini juga meliputi studi lapang di daerah lain untuk mendapatkan masukan yang lebih dapat dipercaya dan memperkaya analisis penentuan prioritas strategi pengembangan.

2. Hasil AHP

Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki; memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi atau dengan kata lain, prinsip metode AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu dengan lainnya (Sutinah & Nisa, 2018). Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam mengevaluasi Program - Program Strategis Pemerintah di Bidang Ekonomi dalam upaya penguatan dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat (Simanjorang, 2018). Dalam menyelesaikan persoalan dengan menggunakan model AHP perlu dilakukan beberapa langkah antara lain (Syamiruddin, 2014).

- a. Memecahkan persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya (*Decomposition*)
- b. Penilaian Perbandingan Kepentingan (*Comparative Judgment*)
- c. Melakukan Sintesis Prioritas (*Synthesis of Priority*)
- d. Menentukan Konsistensi Logis (*Logical Consistency*)



Gambar 3. Model AHP Pariwisata Bangkalan

Gambar 3 di atas menggambarkan logika kerja Analisis Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk menentukan “Prioritas Pengembangan Pariwisata”. Adapun kriteria yang diajukan antara lain kondisi geografis yang meliputi keindahan alam serta aspek lain yang mendukung; aspek sosial budaya yang meliputi nilai-nilai hidup yang dijalankan oleh masyarakat setempat serta penerimaan masyarakat akan pengembangan wisata; aspek kelengkapan sarana dan prasarana serta aspek lain yang oleh narasumber/responden dipandang penting untuk ditambahkan sebagai faktor penting untuk menentukan prioritas pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan.

Setelah faktor-faktor kriteria penting teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif destinasi wisata yang diinginkan. Beberapa destinasi yang diajukan adalah wisata alam, wisata religi dan wisata kuliner. Penelitian ini juga mengajukan alternatif destinasi wisata jika dalam proses interviu dirasa perlu untuk melakukan penambahan alternatif destinasi wisata. Hasil dari perhitungan AHP Pariwisata di Kabupaten Bangkalan dapat disajikan dalam matriks Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Skor Kriteria Pariwisata

Kriteria	Geografi	Sosial Budaya	Prasarana	Prioritas
Geografi	1	1/2	1/4	0,14
Sosial Budaya	2	1	1/2	0,29
Prasarana	4	2	1	0,57

Hasil menunjukkan bahwa kriteria prasarana terbukti memiliki angka skor yang relatif paling tinggi dibandingkan dengan skor aspek geografi dan skor sosial budaya. Oleh karena itu jelas menunjukkan bahwa hasil penelitian yang bersumber dari narasumber pengguna pariwisata di Kabupaten Bangkalan, merekomendasikan aspek sarana dan prasarana

dijadikan sebagai patokan utama dalam mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Bangkalan.

Selanjutnya, untuk masing-masing kriteria dilakukan perhitungan mengenai alternatif wisata yang paling relevan. Hasilnya dapat dirangkum pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Skor alternatif pariwisata

Jenis	Geografi	Sosial Budaya	Prasarana
Wisata Alam	0,13	0,10	0,32
Wisata Kuliner	0,21	0,33	0,22
Wisata Religi	0,66	0,57	0,46

Ditinjau dari aspek geografis, wisata religi ternyata memiliki skor yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nilai dari wisata religi diatas 60 persen dibandingkan dengan wisata alam dan wisata kuliner. Setelah itu, ditinjau dari aspek sosial budaya, wisata religi juga memiliki skor yang paling tinggi dibandingkan dengan skor wisata alam dan wisata kuliner. Terakhir, ditinjau dari aspek prasarana, ternyata wisata religi juga memiliki skor relatif yang paling tinggi meskipun nilainya tidak setinggi dibandingkan dengan aspek yang lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan menelusuri skor per kriteria, maka wisata religi dapat dikatakan memiliki penilaian yang relatif paling tinggi dibandingkan dengan skor dari aspek yang lain.

Hasil sintesis mengenai hasil akhir dari AHP Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangkalan dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1. Wisata Alam : 0,2296
- 2. Wisata Kuliner : 0,2505
- 3. Wisata Religi : 0,5199

Berdasarkan sistesis tersebut di atas maka dengan jelas dapat ditunjukkan bahwa prioritas pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan adalah pariwisata dengan nuansa religi. Hasil ini tidak serta merta ingin menyatakan bahwa model destinasi lain seperti wisata kuliner dan wisata alam tidak penting. Semuanya sama-sama penting hanya saja aspek wisata religi menurut hasil penelitian ternyata memiliki bobot pengembangan prioritas yang lebih tinggi (didas 50%).

Sementara itu destinasi wisata lain seperti wisata alam dan kuliner juga penting untuk dikembangkan. Namun demikian, berdasarkan hasil temuan dapat dikatakan bahwa wisata alam dan wisata kuliner menempati prioritas berikutnya untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Bobot skor AHP untuk wisata alam dan wisata kuliner masing-masing adalah sebesar 23% dan 25% (Bandingkan dengan bobot wisata religi sebesar 51%).

Hasil kegiatan ini dengan jelas menunjukkan bahwa wisata religi menurut sumber informan yang digunakan dalam penelitian ini direkomendasikan menjadi sentra pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Hal ini sesuai dengan kultur Madura yang lebih banyak berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika lebih banyak responden yang memberikan dukungan terhadap pengembangan wisata religi di Bangkalan. Namun demikian, jenis wisata lain bukan tidak direkomendasikan. Hanya saja, pengembangan wisata jenis lain menurut hasil penelitian tidak begitu direkomendasikan dikembangkan dalam jangka pendek. Ke depan, jenis aneka wisata lain bisa kembangkan lebih lanjut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan ini maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan harus memperhatikan setidaknya beberapa kriteria yang cukup penting: antara lain, keunikan wilayah atau geografis; kondisi sosial masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana, 2) Dari beberapa aspek yang dievaluasi, maka dapat ditemukan bahwa prasarana memiliki bobot kepentingan yang relatif paling besar. Dengan demikian, pengembangan pariwisata harus menempatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sebagai kunci utama dari pengembangan wilayah, 3) Berdasarkan observasi dan wawancara langsung di lapangan ditemukan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki tiga potensi pengembangan destinasi wisata; wisata alam, wisata kuliner dan wisata religi, 4) Hasil kajian menunjukkan bahwa wisata religi menempati urutan pertama dari bobot kepentingan pengembangan. Dengan kata lain, khususnya di sektor pariwisata, pengembangan wisata religi sangat potensial untuk dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Bangkalan. Saran untuk kegiatan lanjutan adalah, model penentuan prioritas pengembangan wilayah berbasis data ini diikuti oleh beberapa dinas terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penentuan kebijakan serta menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien. Atas dasar kegiatan ini, maka disarankan bagi pemerintah daerah setempat agar mengembangkan wilayah sesuai dengan rekomendasi hasil kajian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan yang telah mendanai kegiatan pendampingan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tim FEB Universitas Trunojoyo Madura yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah final.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, R. W., Nurjani, Y., & Susanti, P. (2017). Aplikasi pemberian kredit mikro pada bank xyz dengan metode analytical hierarchy process. *Fortech (Journal of Information Technology)*, 1(2), 15–21.
- Harahap, H. I. (2018). Peluang Masyarakat Pesisir di Kampung Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, 2(2), 143–148.
- Kamil, A., Bakhtiar, A., & Sriyanto. (2016). Pemilihan Bahan Pewarna Alam Batik Tulis di Usaha Kecil dan Menengah Semarang Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Industrial Engineering Online Journal*, 5(2).
- Katarina, & Fithriana, N. (2017). Pengembangan sektor pariwisata dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 120–125.
- Khotimah, K., Wilopo, & Hakim, L. (2017). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 41(1), 56–65.
- Mukti, M. D. L., Makmur, M., & Adiono, R. (2015). Strategi Pengembangan Kawasan Barat Sungai Brantas Kota Kediri sebagai Destinasi Pariwisata Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kawasan Objek Wisata Selomangleng Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1797–1803.
- Nurhadi, F. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 325–331.
- Prasodjo, T. (2017). Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Office*, 3(1), 7–12.
- Primadani, S., Mardiyono, & Riyanto. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135–143.
- Setyaningrum, A., Budi, H., & Masduqi, E. (2017). Development Strategy of Tourism Activity Base on Coastal and Marine Resources in Depok Beach , Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 7(2), 179–190.
- Simanjorang, R. M. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Lulusan Terbaik Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Mantik Penusa*, 2(1), 1–10.
- Sugiyarto, & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45–52.
- Susilawati, H. Mappamiring, A. S. (2016). Strategi pengembangan pariwisata pantai bira sebagai sumber unggulan pendapatan asli di daerah Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1).
- Sutinah, E., & Nisa, K. (2018). Kombinasi Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution Dalam Pemilihan Supplier. *Informatics for Educators and Professionals*, 2(2), 115–124.
- Syamiruddin. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Mesin Tugoat Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)(Studi Kasus : Pt. Pelayaran Sopia Line). *Jurnal Sistemasi*, 3(1), 54–67.